

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ODGJ TERLANTAR DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Angga Arista
31.0215

Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 31.0215@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dwi Putri Yuliani, M.M.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *This research is based on the problem of ODGJ neglect in the Muara Enim Regency. Cross-sectoral collaboration is crucial to provide them with appropriate services and to ensure security and peace in the community. Unfortunately, the current handling of the situation is suboptimal due to a lack of strong sectoral relationships between the community, government, and private sector.*

Purpose: *The research aims to examine the appropriate mechanisms for handling displaced ODGJ in Muara Enim Regency, utilizing the concept of Collaborative Governance and identifying the driving and inhibiting factors. The theory used to examine this research is the Collaborative Governance Theory coined by Ansell and Gash.*

Method: *In the assessment process, researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation.*

Result: *The results of the study conducted by the researcher in this study found that the exclusivity of each sector and the different resource conditions, which were met with the object of the problem in this study, namely displaced ODGJ, became the main factor in encouraging a collaborative action between each sector in dealing with the problem of displaced ODGJ. However, in addition to these encouraging factors, there are still inhibiting factors such as the allocation of funds in the handling of displaced ODGJ by each sector and basic problems such as the difficulty of controlling the emotional condition of the person when secured and there is no specific SOP in handling this problem.*

Conclusion: *It can be concluded that collaborative action in handling displaced ODGJ can be implemented, but the cross-sectoral actors involved still need to pay attention to comprehensive steps in dealing with the inhibiting factors that the researchers have described in this study.*

Keywords: *Collaborative, Handling, Displaced ODGJ*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari masalah mengenai ODGJ yang terlantar di wilayah Kabupaten Muara Enim. Keterlibatan lintas sektoral sangat diharapkan dalam dalam penangan masalah ini, yang mana agar mereka dapat

mendapatkan pelayanan yang tepat, dan terciptanya keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Namun sayangnya, penanganan tersebut belum optimal dikarenakan belum terjalinnya suatu hubungan sektoral yang kuat baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam menangani kasus ini. **Tujuan:** penelitian ditujukan untuk mengkaji mekanisme yang tepat dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim, dengan menggunakan konsep *Collaborative Governance* serta mengetahui faktor pendorong dan juga faktor penghambatnya. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Teori *Collaborative Governance* yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. **Metode:** Dalam proses pengkajian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, menjadi faktor utama dalam mendorong adanya suatu tindak kolaboratif antara masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, masih ditemukan faktor penghambat seperti pengalokasian dana dalam penanganan ODGJ terlantar ini oleh masing-masing sektor dan adanya permasalahan dasar seperti sulitnya upaya mengendalikan kondisi emosional dari pengidap saat diamankan serta belum ada SOP khusus dalam hal penanganan masalah ini. Masalah-masalah ini dapat menjadi faktor yang mengganggu kelancaran tindak kolaboratif antar sektor yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus oleh masing-masing sektor dalam menghadapi masalah ini agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini, diketahui tindak kolaboratif dalam penanganan ODGJ terlantar sudah dapat dilaksanakan, namun lintas sektoral yang terlibat masih perlu memperhatikan langkah komprehensif dalam menangani faktor penghambat yang telah peneliti jabarkan pada penelitian ini. **Kata Kunci:** Kolaboratif, Penanganan, ODGJ terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berikut beberapa kasus tragis terkait masalah ODGJ terlantar yang dirangkum dari berbagai laman berita lokal maupun nasional yang membahas mengenai masalah ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim :

Tabel 1
Temuan Kasus ODGJ Terlantar melalui Berita

No.	Tanggal	Jumlah	Lokasi temuan	Jenis perkara
1.	19 September 2021	1 Orang	Diserahkan oleh pihak keluarga di Dusun Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul	Mengamuk dan memukul warga
2.	16 Oktober 2021	1 Orang	Di aliran Sungai Enim, wilayah Kecamatan Lawang Kidul	Tewas hanyut di sungai Enim
3.	21 Maret 2022	1 Orang	Di Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara	Ditemukan tewas, diduga akibat kelaparan dan sakit

No.	Tanggal	Jumlah	Lokasi temuan	Jenis perkara
			Enim	tanpa identitas maupun kerabat yang diketahui
4.	11 Juni 2022	3 Orang	Di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim	ODGJ yang tidak diketahui asalnya, pelaku lempar batu dan kayu ke warga maupun pengendara
5.	29 Juni 2022	1 Orang	Di depan Kantor Bupati Muara Enim	ODGJ pelaku penikaman warga
6.	31 Agustus 2022	3 Orang	Di Talang Jwa Kabupaten Muara Enim	Menggelandang dan mengamuk dengan mengejar dan melempar penduduk dengan batu
7.	26 Agustus 2023	1 Orang	Di Jalan lintas Sumatera, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang	Tewas sebagai korban tabrak lari
8.	12 Mei 2024	1 Orang	Jalan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim	ODGJ terlantar di pukuli oleh pemuda
9.	14 Mei 2024	1 Orang	Di salah satu rumah terbengkalai Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang	Tewas Terlantar
10.	16 Mei 2024	1 Orang	Di Jalan Lintas Provinsi, Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim	Tertabrak Pengendara Mobil

Sumber :Kumpulan berita (Detikline, 2022; Enimekspres, 2023, 2024; indosiber, 2022; Info Media Kota, 2022; Info Muara Enim, 2024; Lentera Pendidikan, 2022; Pojok Sumsel, 2021; RmolSumsel, 2024; SimburSumatera, 2021)

Selain itu beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 74 Kasus temuan pemasangan yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan beberapa diantaranya ditemukan dalam kondisi tewas karena tidak tertangani secara baik oleh pihak masyarakat maupun keluarga (RmolSumsel, 2023).

Seperti yang diketahui ODGJ terlantar dengan tidak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial oleh pemerintah, dapat berpotensi membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya, hal tersebut karena adanya potensi kekambuhan (mengamuk) yang dialami oleh pengidap gangguan jiwa tersebut, yang mana secara tidak langsung berdampak dengan ketertiban dan keselamatan pada

masyarakat (Cahyaningrum & Syafiq, 2022 : 100).

Menurut Dr. Eva Eviany, M.Si. (2023), pada dasarnya pemerintah dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Jika tidak, maka runtuhlah wibawa, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, dengan terlaksananya proses penanganan ODGJ terlantar dengan baik, menandai keberhasilan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dari sekian banyak kasus ODGJ yang terlantar baik disengaja oleh pihak keluarga ataupun menggelandang tanpa identitas yang berada di Kabupaten Muara Enim. Hanya 47 kasus yang baru ditangani dan mendapatkan rujukan. Padahal berdasarkan postingan media berita lokal, yang mana mengekspos dalam kurun waktu 2022-2023 saja terdapat 74 kasus penelantaran, dan 5 ODGJ tewas dalam keadaan terlantar dan menjadi korban kecelakaan.

Berbicara mengenai masalah kesehatan dan kesejahteraan, jika berangkat dari temuan-temuan yang telah dijabarkan diatas, hal tersebut tentu sangatlah disayangkan. Pasalnya, Kabupaten Muara Enim menempatkan perkara kesehatan dan kesejahteraan sebagai salah satu indikator yang dijadikan prioritas visi dari Kabupaten Muara Enim itu sendiri. Berikut bunyi dari visi Kabupaten Muara Enim itu sendiri :

“MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA ”

Melihat kondisi mengenai kesehatan jiwa terkhusus ketelantaran yang dialami oleh penyandang gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Muara Enim, hal itu dirasa belum sesuai dengan penjabaran mengenai visi yang dicantumkan dalam indikator sehat dan sejahtera pada visi tersebut. Terlebih kondisi tersebut mengancam keselamatan dari ODGJ yang terlantar sendiri maupun masyarakat yang ada disekitarnya, maka dari itu perlu adanya upaya komprehensif dalam menangani masalah ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim itu sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penanganan ODGJ terlantar merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, namun dalam proses penanganannya tetap diperlukan upaya sektoral guna mengoptimalkan upaya yang dilakukan. Hal itu didukung dengan pasal 1 ayat 15, pasal 29, dan pasal 30 pada peraturan tersebut, yang menjelaskan bahwa upaya dalam menangani masalah-masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya dapat dilakukan oleh dinas sosial saja, karena di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya peluang bagi lintas unit pemerintah terkait untuk memfasilitasi kelancaran dalam penanganan masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut. Adapun dalam pasal tersebut juga menyebutkan masyarakat maupun pihak swasta dapat pula terlibat aktif dalam upaya kesejahteraan sosial itu sendiri.

Sayangnya berdasarkan kondisi fakta terkait kasus yang disebabkan dari adanya ketelantaran yang dialami oleh pengidap gangguan jiwa di Kabupaten Muara Enim, hal tersebut disebabkan karena adanya kecenderungan lambannya respon masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kondisi ini. masyarakat dan pemerintah dinilai baru merespon hal tersebut apabila sudah terjadi suatu masalah keamanan yang timbul akibat dari keberadaan ODGJ terlantar di wilayah mereka. Searah dengan kondisi demikian Prof. Dr. Budi A Keliat, M.App.Sc selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, juga menilai bahwa pemerintah Indonesia belum optimal dalam

mengupayakan perhatiannya terhadap permasalahan kesehatan jiwa bahkan terbelang setengah-setengah dalam penanganannya. maka beliau menilai perlu adanya peningkatan upaya yang komprehensif dan juga sistem kolaboratif guna menangani permasalahan-permasalahan kesehatan jiwa ini (Syahputra, 2023).

Oleh karena itu, konsep *Collaborative Governance* dirasa dapat untuk diterapkan dalam menghadapi kondisi demikian. Hal tersebut dilaksanakan, guna dalam upaya penanganan-penanganan urusan sosial tidak hanya dilaksanakan sebatas dengan melaksanakan transfer kewenangan dan tanggung jawab antar *stakeholder* semata, yang akhirnya akan berujung kepada kurang optimalnya hasil penanganan terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan berdampak pada gagalnya mencapai keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara (Mardika, 2022 : 74).

Mengingat urgensi dari masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana proses terjalannya tindak kolaborasi yang terjalin antara Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim selaku sektor yang dipetakan pada sisi pemerintah, pihak swasta yang diwakili oleh Yayasan Mitra Mulia Husada, dan Masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar yang ada di Kabupaten Muara Enim melalui konsep *collaborative governance* yang dicetuskan oleh Ansell & Gash (2007 : 8), dengan judul “*Collaborative Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*”.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan tujuh penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Nadia Khumairatun Nisa, Hertanto, Ari Darmastuti & Pitojo Budiono (2023), yang berjudul *Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dinamika kolaborasi yang dilaksanakan tidak terlaksana dengan optimal, dampak dan adaptasi kolaborasi cenderung didominasi oleh hasil yang kurang baik dikarenakan belum adanya adaptasi yang dilakukan oleh aktor yang melaksanakan kolaborasi.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Pratiwi Cahyaningrum dan Muhammad Syafiq (2022), yang berjudul *Gambaran Dukungan Sosial terhadap Penderita Gangguan Jiwa Terlantar*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada klien maka akan berdampak pada semakin cepatnya pemulihan yang dialami klien. Yang pada akhirnya gangguan yang diderita oleh klien dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Penelitian ketiga yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Nandini Audina, Ike Rachmawati, dan Dian Purwanti (2019), yang berjudul *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga terkait, dalam menangani masalah ODGJ terlantar di Kota Sukabumi, hal tersebut dikarenakan belum adanya penyamaan persepsi melalui koordinasi dalam menangani masalah ODGJ terlantar di sukabumi tersebut.

Penelitian keempat yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Raden Mahendra Haryo Bharoto, Nursahidin, dan Iin Indrayanti (2020), yang berjudul *Beggars, Homeless, and Displaced People: Psycho-Social Phenomena and the*

Implementation of Local Government Policy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Pengungsi (PGOT) di Cirebon kurang efektif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penanganan PGOT di perkotaan memerlukan banyak dukungan dari pemerintah daerah seperti sumber daya manusia, anggaran keuangan dan fasilitas.

Penelitian kelima yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Nyoman Augusto Mardika (2022), yang berjudul Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilaksanakan masih banyak mengalami kendala yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pembinaan, dan rehabilitasi, serta ketiadaan regulasi yang menaungi pelaksanaan regulasi itu sendiri.

Penelitian keenam yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Zahratul Fajria (2021), yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Penderita Skizofrenia di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum terjalin dengan baik berdasarkan perspektif konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh deseve, serta ditambah dengan belum adanya regulasi yang mengikat dalam kesatuan pelaksanaan penanganan masalah ODGJ tersebut di Kota Banda Aceh.

Penelitian ketujuh yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Intan Kumalasari (2018) yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan baru beberapa sektor yang berjalan dengan baik yakni keterlibatan antar aktor sesuai dengan otoritas masing-masing serta pembagian *network* sesuai dengan tupoksinya, sedangkan sisanya masih belum berjalan dengan optimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tujuh karya tulis ilmiah terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada bagian objek, fokus, metode maupun teori yang digunakan. Namun dari penelitian yang telah disebutkan diatas tidak ada satupun penelitian yang memiliki kesamaan secara utuh mengenai topik yang diteliti. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai tindak kolaborasi yang terjalin dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim tersebut dengan menggunakan konsep *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2007 : 8). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut dimaksudkan guna menjelaskan mekanisme yang runut terkait proses penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim dengan mengacu kepada konsep *Collaborative Governance* yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Sama seperti pada penelitian kualitatif pada umumnya, Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme yang tepat dalam penanganan ODGJ terlantar, melalui konsep *Collaborative Governance* yang ada di Kabupaten Muara Enim, serta untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat tindak kolaboratif dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten Muara Enim.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan melalui narasi dan penggambaran terkait situasi pelaksanaan dari tindak kolaboratif yang dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep *collaborative governance* guna mengetahui mekanisme penanganan ODGJ terlantar yang tepat di Kabupaten Muara Enim. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti tidak terbatas hanya ingin mendapatkan gambaran ataupun penjelasan singkat mengenai fokus yang diteliti, namun peneliti terdorong untuk mendapatkan penjabaran lebih dalam mengenai pemahaman substansi dari apa yang peneliti teliti dengan karakteristik yang dimiliki dalam metode penelitian kualitatif ini (Sugiyono, 2013).

Peneliti menggunakan operasionalisasi konsep dengan mengacu pada teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang memiliki 4 dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dari dimensi tersebut terdapat indikator yang masing-masing dimensi memiliki ukuran sebagai tujuan tercapainya dimensi tersebut. Sumber data pada penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menentukan sumber Informan peneliti menggunakan Teknik *Purposive sampling* yang mana informan pada teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki, untuk dijadikan sebagai informan. dan *Snowball Sampling* digunakan peneliti dalam mencari informasi melalui penyelidikan hubungan dalam sebuah kelompok dengan mencari informasi yang tersebar dikalangan itu, pemilihan informan didasari oleh rekomendasi yang diberikan oleh informan kunci sebelumnya, guna memudahkan peneliti untuk mencari informasi terkait sumber data penelitian yang dibutuhkan

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri dimana peneliti berperan melakukan berbagai kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data, wawancara, observasi dan menyimpulkan data-data tersebut dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara struktur dan semistruktur, serta dokumentasi.. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri atas pemadatan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengkajian konsep *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim

Teori *Collaborative Governance* memiliki 4 dimensi yang digunakan untuk mengkaji tindak kolaboratif yang dilaksanakan dalam menangani ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim, antara lain Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan yang Fasilitatif, dan juga Tindak Kolaboratif. Masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator yang peneliti gunakan untuk melihat kondisi masing-masing sektor dalam menangani ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim.

1. Kondisi Awal

Dimensi Pertama yakni Kondisi Awal pada dimensi ini memiliki indikator kondisi sumber daya, pendorong, dan juga riwayat permasalahan. Untuk indikator kondisi sumber daya, terlepas dari kekurangan yang ada, masing-masing sektor memiliki gambaran yang cukup baik terkait dengan

kondisi dari sumber daya yang mereka miliki dalam menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Kekurangan tersebutlah yang mendominasi potensi terjalannya kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan ODGJ terlantar ini, hanya saja beberapa kekurangan seperti finansial/alokasi dana, kondisi lapangan, dan juga SOP yang tepat perlu diperhatikan lebih lanjut dalam menghadapi tindak kolaboratif penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.

2. Desain Kelembagaan

Dimensi ini memiliki indikator partisipasi anggota, eksklusivitas masing-masing sektor dan juga aturan dasar yang mengikat. Secara umum, masing-masing sektor memiliki tingkat partisipasi yang baik, hanya saja kendala ditemukan dari kurangnya pengetahuan masyarakat dalam prosedur penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Untuk masing-masing sektor memiliki eksklusivitasnya masing-masing dengan pihak swasta yang ditempatkan sebagai tenaga pembantu Dinas Sosial dalam merehabilitasi ODGJ terlantar itu sendiri. Sedangkan untuk aturan dasar yang mengikat masing-masing sektor memiliki peraturan yang pada umumnya memiliki rujukan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama sehingga mempertegas eksklusivitas masing-masing sektor dalam penanganan ODGJ terlantar sendiri.

3. Kepemimpinan yang Fasilitatif

Adapun dimensi kepemimpinan yang fasilitatif, yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan pemimpin pada masing-masing sektor dalam memberdayakan sumber daya terutama anggotanya dalam menangani ODGJ terlantar ini. Hasil yang didapat yakni setiap sektor memiliki peluang untuk bekerja sama dengan baik, yang mana masing-masing sektor dinilai sudah memiliki pimpinan yang memiliki karakter yang dibutuhkan dalam proses kolaboratif ini. Namun sayangnya belum terdapat pendekatan dan koordinasi yang baik dalam menunjang jalannya proses kolaboratif dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.

4. Tindak Kolaboratif

Berikut indikator dalam dimensi tindak kolaboratif yakni dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen dalam berkolaborasi, pemahaman bersama dan juga dampak sementara. Untuk hasil pengkajian dimensi ini, menunjukkan bahwa dialog lintas sektoral secara langsung hanya dilaksanakan saat pelaksanaan sosialisasi perda, dan selanjutnya lebih sering melaksanakan komunikasi nonformal. Selanjutnya mengenai indikator pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama menunjukkan hasil yang cukup baik oleh masing-masing sektor dimana menunjukkan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat menyatakan kesediaan dalam melaksanakan tindak kolaboratif dalam penanganan ODGJ terlantar ini.

Pada indikator pemahaman bersama, masing-masing sektor memiliki keyakinan bahwasanya penting dalam menangani ODGJ terlantar ini, namun yang menjadi catatan masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan mengenai prosedur penanganan yang tepat guna mengoptimalkan upaya penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Dampak dari penanganan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penanganan ODGJ terlantar ini masih memiliki kekurangan terkhusus pada indikator dialog lintas sektoral yang dilaksanakan. Dampak dari kekurangan tersebut menyebabkan sektor masyarakat masih meraba-raba dalam proses penanganan ODGJ terlantar ini, sehingga menghambat jalannya tindak

kolaborasi yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar mengacu pada dimensi tindak kolaboratif ini.

3.2 Faktor Pendorong Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim

Berikut faktor pendorong pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim :

1. Perbedaan kemampuan dan kondisi sumber daya;
Masing-masing sektor memiliki perbedaan dari segi sumber daya yang dimiliki baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masing-masing sektor memiliki bidang dan peran secara khusus serta kemampuan yang berbeda dalam penanganan masalah ODGJ terlantar ini sendiri.
2. Eksklusivitas masing-masing sektor;
Masing-masing sektor memiliki peranannya dalam proses penanganan ODGJ terlantar ini. Adapun pemerintah yang bergerak sebagai pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial, penertiban, pelayanan kependudukan dan kesehatan. Pihak swasta yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi ODGJ terlantar. Serta, pihak masyarakat berkontribusi sebagai pendukung pemerintah dalam penanganan masalah ODGJ terlantar ini, mulai dari pelaporan maupun perawatan dan penanganan terhadap ODGJ yang terlantar itu sendiri.
3. Peraturan yang mengikat;
Peraturan yang dijadikan dasar pelaksanaan penanganan masalah ODGJ terlantar dikoordinasi oleh pihak Dinas Sosial, namun dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut membuka peluang bagi masyarakat, swasta, dan instansi pemerintah lainnya dapat terlibat dalam proses penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.
4. Tingkat partisipasi anggota yang baik;
Masing-masing perwakilan sektor memberi kesaksian bahwa setiap anggotanya turut berpartisipasi dalam setiap proses penanganan ODGJ terlantar yang diadakan di Kabupaten Muara Enim.
5. Kemampuan pimpinan dalam memberdayakan sumber dayanya;
Perwakilan anggota dari masing-masing sektor memiliki kesaksian bahwa masing-masing pimpinannya memiliki karakter yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor dalam memimpin anggotanya.
6. Kepercayaan antara sektor yang terlibat;
Masing-masing sektor mengutarakan kepercayaan mereka dalam keterlibatan sektor lainnya untuk berperan dalam tindak kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim.
7. Komitmen antara sektor yang terlibat.
Masing-masing sektor memberikan pernyataan terkait bagaimana bentuk komitmen mereka dalam mendukung proses penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim.

3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim

Berikut faktor penghambat pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim :

1. Tingkat dialog tatap muka antar stakeholder yang masih rendah ;
Dari hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan tindakan dialog secara langsung masih sangat rendah untuk dilaksanakan oleh masing-masing sektor.
2. Adanya beberapa riwayat permasalahan dalam kondisi awal penanganan.
Beberapa riwayat masalah terdahulu yang pernah dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar seperti kesalahan masyarakat dalam melapor, kurangnya alokasi dana dalam proses penanganan, serta kondisi ketidakstabilan dari pengidap gangguan jiwa yang akan diamankan oleh aparat turut menjadi penghambat dalam proses penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.

3.4 Upaya Dalam Menangani ODGJ Terlantar di Kabupaten Muara Enim

Penanganan ODGJ terlantar ini melibatkan sebagian besar sektor yang harus dilibatkan guna mengoptimalkan penanganan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, alur penanganan dimulai dengan adanya laporan masyarakat terkait adanya temuan ODGJ dengan kondisi baik itu menggelandang, mengamuk dan mengganggu ketertiban, dipasung, maupun membahayakan dirinya, keluarganya maupun lingkungan sekitarnya kepada pihak desa/kelurahan. Pihak desa/kelurahan wajib mengkonfirmasi temuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak Dinas Sosial.

Selanjutnya Dinas Sosial mengkoordinir dinas terkait untuk pelaksanaan penangananan ODGJ yang dilaporkan tersebut dengan membentuk tim khusus yang didalamnya terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang mana tim ini juga merupakan tim yang sama dalam penanganan terhadap orang terlantar. Dinas-dinas yang telah disebutkan tadi menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Setelah diamankan, ODGJ tersebut dilakukan pengecekan identitas diri dan juga anggota keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga pengecekan kesehatan dasar oleh dinas kesehatan. Jika diketahui ODGJ tersebut memerlukan bantuan medis luar dengan segera, maka ODGJ tersebut akan dibawa ke puskesmas pada kecamatan terdekat. Selanjutnya untuk pengecekan administrasi kependudukan akan diketahui ODGJ tersebut memiliki atau tidak memiliki identitas pengenal dan anggota keluarga. Dari hasil tersebut akan membentuk dua pola penanganan yang berbeda antara mereka yang memiliki anggota keluarga dan yang tidak memiliki anggota keluarga.

Untuk ODGJ yang tidak memiliki anggota keluarga dan tidak diketahui identitas dirinya, akan dilakukan perekaman data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Guna memenuhi syarat dalam pembuatan BPJS kesehatan. Selanjutnya, pengidap gangguan jiwa tersebut akan diupayakan mendapatkan akses rehabilitasi di Panti PGOT yang merupakan UPTD milik Provinsi. Jika pihak UPTD menolak dikarenakan satu atau dua alasan lainnya. Maka akan diupayakan pencarian yayasan yang siap menampung ODGJ tersebut untuk penanganan rehabilitasi di dekat pusat Kota Palembang.

Sedangkan, untuk pengidap gangguan jiwa yang memiliki data kependudukan dan diketahui anggota keluarganya, akan dilakukan pengecekan kepemilikan jaminan kesehatan nasional (JKN) milik mereka. Jika pengidap tersebut tidak memiliki JKN, maka ada akan diajukan pembuatan BPJS. Sembari menunggu aktivasi BPJS, dengan persetujuan pihak keluarga dari ODGJ tersebut, mereka akan dibuatkan pengajuan

rujukan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar, untuk mendapatkan rehabilitasi medis selama tiga minggu. Setelah mendapatkan perawatan selama tiga minggu, mereka akan di serahkan kembali ke pihak keluarga apakah akan dilakukan pengobatan lanjutan secara mandiri atau ditiptkan ke panti/yayasan terdekat agar tidak terlalu jauh dari pusat penanganan kejiwaan di Provinsi Sumatera Selatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa masih terdapat beberapa masalah ketelantaran yang peneliti temukan secara langsung diluar data penanganan yang disajikan. Menindaklanjuti urgensi dari kondisi ketelantaran ODGJ di Kabupaten Muara Enim, seharusnya sudah ada SOP khusus yang dibuat dalam menghadapi kasus ketelantaran ODGJ terlantar itu sendiri. Sayangnya fakta menunjukkan belum ada SOP yang dijadikan acuan bahkan masyarakat masih merabab-raba terkait proses penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Fakta tersebut, memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Zahratul Fajria (2021), yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Penderita Skizofrenia di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi yang mengikat dalam kesatuan pelaksanaan penanganan masalah ODGJ tersebut di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, mengacu pada pengkajian terhadap teori *Collaborative Governance* yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash, didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, sudah cukup untuk menjadi alasan pendorong dalam adanya suatu keterlibatan masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, tetap saja tindak kolaboratif yang dilaksanakan belum berjalan dengan optimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Khumairatun Nisa, Hertanto, Ari Darmastuti & Pitojo Budiono (2023). Kolaborasi yang dilaksanakan tidak terlaksana dengan optimal, dampak dan adaptasi kolaborasi cenderung didominasi oleh hasil yang kurang baik dikarenakan belum adanya adaptasi yang dilakukan oleh aktor yang melaksanakan kolaborasi.

Adapun penelitian oleh Intan Kumalasari (2018), juga memiliki kesamaan pada hasil penelitian ini yang mana kolaborasi yang dijalankan baru beberapa sektor yang berjalan dengan baik yakni keterlibatan antar aktor sesuai dengan otoritas masing-masing serta pembagian bidang sesuai dengan tupoksinya, sedangkan sisanya masih belum berjalan dengan optimal. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus dalam menghadapi masalah tersebut agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya penanganan ODGJ terlantar itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang peneliti lakukan mengenai penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim, berpotensi dapat dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antara tiga sektor yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang mana hal tersebut dapat terlihat melalui hasil pengkajian konsep *Collaborative Governance* yang peneliti kaji pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan alur prosedur penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim yang belum secara legal dijadikan dasar oleh pemerintah dalam menangani masalah ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim,

mulai dari penemuan ODGJ terlantar, diamankan, dicek kesehatan dan identitas, pemberian pelayanan kesehan/rehabilitasi, sampai dengan tindak lanjut penanganan rehab secara mandiri di masyarakat atau penitipan rehabilitasi di pihak yayasan.

Dari hasil kajian yang peneliti lakukan, didapati faktor pendorong dan penghambat dalam penanganan ODGJ Terlantar di Kabupaten Muara Enim melalui pengkajian dengan menggunakan teori *Collabortive Governance* milik Ansell dan Gash (2007).

Faktor Pendorong :

1. Perbedaan kemampuan dan kondisi sumber daya;
2. Eksklusivitas masing-masing sektor;
3. Peraturan yang mengikat;
4. Peraturan yang mengikat;
5. Kemampuan pimpinan dalam memberdayakan sumber dayanya;
6. Kepercayaan antara sektor yang terlibat;
7. Komitmen antara sektor yang terlibat.

Faktor Penghambat :

1. Tingkat dialog tatap muka antar stakeholder yang masih rendah
2. Adanya beberapa riwayat permasalahan dalam kondisi awal penanganan

Keterbatasan Penelitian: Pengkajian narasumber dalam penelitian ini baru melibatkan pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam suatu jalinan tindak kolaboratif dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim,. yang dikaji melalui teori *Collaborative Governance* yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Rentang waktu proses pengumpulan data hanya kurang lebih 15 hari, sehingga menyebabkan kurangnya cakupan wilayah pengamatan dan juga sebaran informan yang sepatutnya dapat ditambahkan dalam menambah kedalaman hasil penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari dengan keterbatasan pada penelitian ini, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengkajian teori *Collaborative Governance* dalam Penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Muara Enim.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh Informan dan Dosen Pembimbing Ibu Dwi Putri Yuliani, M.M serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi:10.1093/jopart/mum032>
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2, 28–38. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Bharoto, R. M. H., Indrayanti, I., & Nursahidin, N. (2020). *Beggars, Homeless, and Displaced People: Psycho-Social Phenomena and the Implementation of Local Government Policy. Icasseth 2019*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.052>
- Cahyaningrum, P., & Syafiq, M. (2022). Gambaran Dukungan Sosial terhadap Penderita Gangguan Jiwa Terlantar. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(1), 100–114.

- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/44824>
- Detikline. (2022). *Satpol PP Muara Enim Tangkap Pelaku Penusukan Yang Diduga ODGJ*. Detikline.<https://www.detikline.com/2022/06/satpol-pp-muara-enim-tangkap-pelaku.html>
- Enimekspres. (2023). *ODGJ Tewas Diduga Jadi Korban Tabrak Lari*. Enimekspres.Co.Id.<https://enimekspres.disway.id/read/659617/odgj-tewas-diduga-jadi-korban-tabrak-lari>
- Enimekspres. (2024). *Waduh, Mobil Minibus Tabarak ODGJ di Desa Lembak, Diduga Karena Kurangnya Konsentrasi*. Enim Ekspres.<https://enimekspres.bacakoran.co/read/3337/waduh-mobil-minibus-tabarak-odgj-di-desa-lembak-diduga-karena-kurangnya-konsentrasi>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. In *PT Nas Media Indonesia*.https://www.researchgate.net/publication/373338177_Perlindungan_Masyarakat_Penyelenggaraan_Ketentraman_Ketertiban_Umum_dan_Manajemen_Kebencanaan
- Fajria, Z. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanganan Penderita Skizofrenia di Kota Banda Aceh*. <http://repository.ar-raniry.ac.id/>
- indosiber. (2022). *Sering Melempar Batu Kepada Warga, ODGJ di Tertipkan Oleh Dinsos, Bersama Sat Pol-PP dan Dukcapil Kab. Muara Enim*. Indosiber.<https://indosiber.id/2022/06/11/sering-melempar-batu-kepada-warga-odgj-di-tertipkan-oleh-dinsos-bersama-sat-pol-pp-dan-dukcapil-kab-muara-enim/?amp>
- Info Media Kota. (2022). *Penemuan Sesosok Mayat Orang Tanpa Identitas Diduga ODGJ di Desa Jemenang Muara Enim*. Info Media Kota.<https://infomediakota.com/penemuan-sesosok-mayat-orang-tanpa-identitas-diduga-odgj-di-desa-jemenang-muara-enim/>
- Info Muara Enim. (2024). *Heboh, Diduga Mayat ODGJ Ditemukan Dibawah Pondok Desa Segayam Gelumbang*. Info Muara Enik. <https://infomuaraenim.com/heboh-diduga-mayat-odgj-ditemukan-dibawah-pondok-desa-segayam-gelumbang/>
- Kumalasari, I., & Dewi, U. (2018). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringin Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Public Policy and Administration*, 2(1), 469–476. <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/index>
- Lentera Pendidikan. (2022). *2 ODGJ dan 1 Orang Terlantar Diamankan Satpol PP Muara Enim*. Lentera Pendidikan.Com.<https://www.lenterapendidikan.com/berita/peristiwa/view/2-odgj-dan-1-orang-terlantar-diamankan-satpol-pp-muara-enim.html>
- Mardika, N. A. (2022). *Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7521>
- Nisa, N. K., Darmastuti, A., Budiono, P., Pemerintahan, M. I., Ilmu, F., Politik, I., & Lampung, U. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung*. 12(3), 961–970. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9545>
- Pojok Sumsel. (2021). *ODGJ Meresahkan Asal Muara Enim Dirujuk Ke RSJ Ernaldi Bahar Palembang*. Pojok Sumsel. <https://pojoksumsel.com/4483/odgj-meresahkan-asal-muara-enim-dirujuk-ke-rsj-ernaldi-bahar-palembang.html>
- RmolSumsel. (2023). *Cegah Pemasungan ODGJ, Dinkes Muara Enim Fokuskan*

- Penjaringan*. RmolSumsel. <https://www.rmolsumsel.id/cegah-pemasangan-odgj-dinkes-muara-enim-fokuskan-penjaringan>
- RmolSumsel. (2024). *Miris, 6 Pelajar SMP di PALI Aniaya ODGJ*. RmolSumsel. <https://www.rmolsumsel.id/miris-6-pelajar-smp-di-pali-aniaya-odgj>
- SimburSumatera. (2021). *Sukarela Tangani ODGJ yang Hanyut, Panti Asuhan di Ganjar Bantuan*. Simbur Sumatera. <https://simbursumatera.com/?p=30124>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Syahputra, R. (2023). *Pentingnya Peran Pemerintah dalam Upaya Penanganan Kesehatan Jiwa*. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/pentingnya-peran-pemerintah-dalam-upaya-penanganan-kesehatan-jiwa/>

